

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan formal di sekolah pada intinya bertujuan agar peserta didik "belajar untuk hidup" dan pada gilirannya ia berkemampuan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup erat kaitannya dengan keberhasilan dalam bermasyarakat. Pendidikan tidak saja berguna bagi dirinya dan keluarga tetapi juga bagi banyak orang. Maka sebenarnya keberhasilan pendidikan formal di sekolah yang pokok adalah bukan seberapa banyak pengetahuan yang didapat oleh siswa, tetapi seberapa besar tingkat keterampilan siswa untuk belajar (*learning skills*). Hal ini mengacu kepada konsep belajar seumur hidup (*live long education*).¹

Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah.²

Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan adanya peningkatan yang merata. Sebagian sekolah, terutama di

¹ Romanus Mudjijana, "Hubungan Antara Iklim Sekolah dan Kecerdasan Emosional Siswa dengan Prestasi Belajar", Tesis, Jurnal Pendidikan Penabur - No. 02, Thlm. III, 2004, hlm. 85

² Semiawan, "Memupuk Bakat Dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah", Jakarta: Grasindo, 1987 hal 17

kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.³

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut adalah melalui pendidikan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (imtak).³

Sutrisno menyatakan bahwa selama ini semua sarana dan prasarana yang diadakan atau dibangun hanya dipandang sebagai instrumen untuk melaksanakan kurikulum. Padahal, kurikulum itu sendiri adalah instrumen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.⁴

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁵ Kurikulum itu harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita suatu bangsa, perkembangan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

³ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

⁴ Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan Studi Kritis terhadap Pemikiran Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Kota Kemtmg, 2006), hlm. 114.

⁵ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 97.

serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap lulusan lembaga pendidikan itu.⁶

Pembaharuan kurikulum diperlukan dan merupakan keharusan dalam suatu sistem pendidikan agar pendidikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Sedemikian pentingnya pembaharuan kurikulum, sehingga ada ungkapan mengatakan bahwa suatu kurikulum disusun untuk diubah dan terus disempurnakan. Hanya dengan demikian, maka kurikulum akan selalu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.⁷

Dalam perjalanannya, dunia pendidikan Indonesia telah menerapkan enam kurikulum, yaitu kurikulum 1968, Kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).⁸

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. KTSP lahir karena KBK dianggap masih cacat dengan beban belajar dan pemerintah pusat (Depdiknas) dipandang masih terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum.⁹

KTSP memiliki beberapa perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu KBK. Perbedaan tersebut, antara lain: pertama, dari segi dasar hukum,

⁶ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 147.

⁷ Ibid., hal. 2

⁸ Ibid., hlm. 3

⁹ Dedi Supriadi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 173.

⁹

KBK belum memiliki landasan hukum yang kuat karena hanya berdasarkan surat edaran Dirjen dan sifatnya masih uji coba, sedangkan KTSP sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Kedua, dalam KBK telah dideskripsikan kompetensi dasar, indikator dan pemetaan materi pokok pelajaran, sedangkan dalam KTSP, Depdiknas hanya mendeskripsikan kompetensi dasar, dan guru sendiri yang mesti menentukan indikator dan materi pokok pelajaran sesuai dengan situasi daerah dan minat anak didik.¹⁰

KTSP merupakan suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum.¹¹

KTSP memberikan otonomi kepada guru untuk menjabarkan kurikulum dan menentukan bahan ajar, sementara pemerintah lewat BSNP hanya menentukan panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Standar Isi, Standar Kompetensi, dan Standar Kelulusan.¹²

¹⁰ Muhammad Joko Susilo, *KTSP.....*, hlm. 2.

¹¹ Enco Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011. Hlm 40

¹² Ibid

Mengingat bahwa penyusunan KTSP diserahkan kepada satuan pendidikan, sekolah dan daerah masing-masing, diasumsikan bahwa satuan pendidikan akan sangat mudah memahami kurikulum tersebut. Satuan pendidikan dapat memahami apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan di daerah masing-masing. Serta melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran, sehingga keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab satuan pendidikan secara profesional.¹³

Dilihat dari definisinya, Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al Qur'an dan Hadist.¹⁴

Beberapa kondisi mengenai penerapan sistem kurikulum PAI sebelum KTSP, antara lain:

1. Aspek penguasaan konsep dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) lebih dominan dibandingkan aspek penerapan konsep, tidak berorientasi pada kebutuhan anak didik di masa depan.¹⁵
2. Pendekatan masih cenderung normatif, dimana pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa disertai ilustrasi konteks

¹³ Enco Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011. Hlm 40

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kerangka dasar kurikulum 2004*. (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas), 2004, hlm 3-4

¹⁵ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam* (Bandung: Nuansa, 2003), hlm.148

sosial budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

3. Semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi kurang tumbuh. Hal ini disebabkan kurikulum yang dibuat lebih menawarkan kompetensi minimum atau informasi minimum, dan pihak guru Pendidikan Agama Islam seringkali terpaku padanya
4. Guru PAI kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan pengelolaan cenderung seadanya. Pendidikan agama yang diklaim aspek yang penting seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas.¹⁶

Berdasarkan beberapa kondisi sistem kurikulum PAI di atas, perlu kiranya dijadikan bahan pemikiran dan pertimbangan bagi para pengelola, pengembang, dan tenaga kependidikan PAI untuk selalu mengembangkan suatu sistem perbaikan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan kehadiran KTSP khususnya dibidang PAI ini, diharapkan dapat mengubah dan memperbaiki kondisi-kondisi diatas, sehingga dapat terwujud sumber daya muslim yang berkualitas yaitu muslim yang berilmu (memiliki kemampuan intelektual tinggi) dan bermoral (memahami nilai-nilai religi dan nilai- nilai sosial).

¹⁶ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

SMK N 2 Pengasih sebagai satu-satunya SMK negeri yang tertua di Kabupaten Kulon Progo dan sudah bertaraf Sekolah Berstandar Internasional (SBI) saat ini sudah menerapkan KTSP. Namun, belum ditemukan adanya penelitian mengenai implementasi sistem KTSP mata pelajaran PAI apakah sudah berjalan baik, dan faktor faktor yang mempengaruhi implementasi KTSP di SMKN 2 Pengasih. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk meneliti implementasi KTSP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Pengasih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi KTSP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi di SMKN 2 Pengasih?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi KTSP Mata Pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Pengasih ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui implementasi KTSP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Pengasih.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi KTSP Mata Pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Pengasih.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penyelenggara pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan koreksi dan evaluasi serta pedoman untuk mengefektifkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya dan administrasi. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pola KTSP yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan tantangan global serta sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar di kelas, sehingga hasil pembelajaran dapat ditingkatkan.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi wawasan keilmuan Manajemen Pendidikan dalam tataran praktik pada lembaga institusional.

D. Landasan Teori

1. Pengertian kurikulum

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin "*curriculum*", yang semula digunakan untuk sejumlah "*courses*" atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar.¹⁷ Kurikulum menurut Caswel and Cambell, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali menjelaskan "*Curriculum is to be compused of the experience have under the guidance*

¹⁷ Nasution, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Aditya Bakti, 1993), hlm. 9.

*of the teacher.*¹⁸ Dari pendapat tersebut terlihat bahwa kurikulum merupakan sekumpulan pengalaman siswa dalam kerangka bimbingan guru.

Kurikulum memiliki pengertian yang cukup kompleks. Esensinya, kurikulum membicarakan proses penyelenggaraan pendidikan sekolah, berupa acuan, rencana dan norma-norma yang dapat dipakai sebagai pegangan.¹⁹ Kurikulum merupakan komponen penting pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola atau penyelenggara. Dalam pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membina dan mengembangkan siswa menjadi manusia yang berilmu, bermoral sebagai pedoman hidupnya dan beramal (menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan manusia dan masyarakat).²⁰

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan memungkinkan penyesuaian program

¹⁸ Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum Di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 2

¹⁹ Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 71.

²⁰ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 3.

pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.²¹ Secara umum, struktur kurikulum mempunyai empat komponen utama, yaitu tujuan, materi/bahan (organisasi), proses belajar mengajar, dan evaluasi.²²

2. Konsep Dasar dan Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong terjadinya perubahan pada beberapa aspek pendidikan, termasuk di dalamnya adalah kurikulum. Dalam hal ini perubahan kurikulum pada semua jenjang pendidikan menjadi perhatian dan pemikiran baru, sehingga mengalami perubahan-perubahan kebijakan.²³

Dalam perjalanannya, dunia pendidikan Indonesia telah menerapkan beberapa kurikulum, yaitu kurikulum 1968, Kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pergantian suatu kurikulum merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka merespons perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Pendidikan harus mampu menyesuaikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, terutama tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan itu bisa dijawab dengan perubahan kurikulum.²⁴

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005. Hlm. 5

²² Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 71.

²³ Enco Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011. Hlm 40

²⁴ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 147.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. KTSP lahir karena dianggap KBK masih cacat dengan beban belajar dan pemerintah pusat (Depdiknas) dipandang masih terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, beban belajar peserta didik sedikit berkurang pada KTSP dan tingkat satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indikator, silabus dan beberapa komponen kurikulum lainnya. KTSP dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan/Kantor Depag Kab/Kota untuk pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Kurikulum ini diluncurkan bersamaan dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, untuk pelaksanaan kedua permen di atas, pemerintah melalui Depdiknas mengeluarkan Permen Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 tahun 2006 tersebut di atas.²⁵

Beberapa persamaan antara KBK dan KTSP, yaitu:²⁶

- a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang bertujuan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar

²⁵ Kunandar: *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, Hlm, 125

²⁶ Abdul Madjid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung : Ramaja Rosda Karya, 2004, hal 80

yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar.

- b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Akan tetapi baik KBK maupun KTSP memiliki tujuan yang sama terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia yaitu sama-sama bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa, berbudi pengerti yang luhur, serta bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun perbedaan antara KBK dengan KTSP, antara lain:

- a. KBK (Depdiknas 2002) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Pencapaian kompetensi siswa (individual/klasikal)

- Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman
- Penyampaian pembelajaran dengan pendekatan dan metode bervariasi
- Sumber belajar guru dan sumber lainnya yang memenuhi unsur edukatif
- Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar
- Menggunakan sistem sentralisasi penuh dari pusat

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan:

- Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
- Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan.
- KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa.
- KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%.
- KTSP memberikan peluang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.

Menurut hasil analisis kedua kurikulum tersebut sama-sama mempunyai tujuan yang baik untuk memajukan pendidikan Indonesia. Akan tetapi dari sisi sistem dan proses pelaksanaannya di lapangan, kami menganggap dan

berpendapat bahwa Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan lebih baik untuk di terapkan di Indonesia. Sistem dan proses yang digunakan oleh KTSP adalah sistem desentralisasi atau otonomi pendidikan dimana setiap sekolah-sekolah di seluruh Indonesia diberi kebebasan untuk mengembangkan dan menyusun sendiri muatan-muatan mata pelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap sekolah. Dengan demikian KTSP menekankan pada proses kontekstual dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan serta dunia kerja. Bila dibandingkan dengan KBK dimana sistem yang diterapkan oleh KBK adalah sistem sentralisasi yang semua perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran disusun dan dilaksanakan semuanya berdasarkan ketentuan dari pusat, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan sekolah serta siswa di lapangan.

Tabel perbedaan antara KBK dan KTSP:²⁷

NO	ASPEK	KBK 2004	KTSP 2006
1	TUJUAN	Menitik beratkan pada pencapaian target kompetensi yakni penguasaan pengetahuan Agama Islam dengan memperhatikan keragaman potensi rohani agar dapat memaksimalkan kompetensi religiusnya	Pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik

²⁷ Abdul Madjid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Bandung : Ramaja Rosda Karya, 2004, hal 80

2	ISI	<p>Menekankan Isi PAI berupa kompetensi yang dirinci menjadi sasaran belajar secara tematik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguraikan kompetensi yang membentuk peserta didik sebagai muslim yang maupu mengaktualisasikan nilai-nilai PAI dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. - Materi disusun secara sistematis berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa 	<p>Materi pembelajaran disusun secara bersama antara Guru, Komite Sekolah MGMP, dan partisipasi siswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguraikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam menyusun Materi ajar PAI
3	FUNGSI	Memelihara dan mewariskan ilmu-ilmu agama Islam	Menciptakan tradisi pada warisan ilmu-ilmu agam Islam dan tradisi lainnya
4	MANAGEMEN	Desentralisasi penyusunan kurikulum (penetapan standar kompetensi) pengembangan dalam bentuk silabus dilakukan di daerah dan sekolah	Pusat menyiapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar PAI SMA/SMK, tugas guru menjabarkan, menganalisis, mengembangkan indikator dan menyesuaikan SKKD dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik, situasi dan kondisi sekolah atau daerah
5	KEDUDUKAN GURU	Guru sebagai fasilitator, memanfaatkan banyak sumber belajar dan mengadakan kerja sama yang terpadu dengan lingkungan sekitarnya.	Guru sebagai fasilitator serta menjabarkan SKKD
6	KEDUDUKAN SISWA	Siswa sebagai subyek berperan aktif menggali potensi rohaninya untuk lebih menyadari fungsi dan kedudukan sebagai muslim	Siswa sebagai subyek menggali potensi eksternal dan internal agar menjadi muslim sejati dan inklusif
7	PENILAIAN	<ul style="list-style-type: none"> - Menilai secara komprehensif tidak hanya pada satu aspek - Hasil penilaian bermanfaat untuk melihat potensi rohani siswa agar dapat mengembangkan kecakapan hidup sebagai khalifah 	Penilaian secara berkala dan berkesinambungan menggunakan model-model CIPP. Hasil penilaian dilakukan dengan penilain kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi benchmarking dan penilaian program

8	PARTSISIPASI MASYARAKAT	Peran masyarakat aktif bersama sekolah mengembangkan program PAI melalui kerja sama terpadu	Melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan program dan Materi PAI yang akomodatif.
---	-------------------------	---	--

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan menurut BSNP “KTSP adalah operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan”. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus”.²⁸

KTSP merupakan suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, sebagai sarana peningkatan kualitas, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

²⁸ BSNP, *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar SD/MI*, Jakarta: BP. Cipta Jaya. 2006. hlm. 449

kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan di daerah masing-masing. Mereka pula yang akan melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang dilakukannya, sehingga keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru secara professional.³³

Keterlibatan kepala sekolah, guru, komite sekolah, masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah dan dewan pendidikan dalam pengambilan keputusan akan membangkitkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap kurikulum, sehingga mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Konsep ini didasarkan pada *self determination theory* yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan, maka akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputusan tersebut.³⁴

Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Beberapa karakteristik KTSP, antara lain:³⁵

- 1) KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Individual maupun Klasikal.

³³ Kunandar: Guru Profesional: *Implementasi Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, Hlm, 125

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

Dalam KTSP peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri.

- 2) KTSP berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
- 3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- 4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif.
- 5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.³⁶

- 1) Berpusat pada potensi, perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungan.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk pengembangan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

³⁶ BNSP, Op.Cit. hlm 450-452

2) Beragam dan terpadu.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.

3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4) Relevan dengan kebutuhan.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan memperhatikan pengembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir (*thinking skill*), kreatifitas sosial, kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional.

5) Menyeluruh dan berkesinambungan.

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan

disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

6) Belajar sepanjang hayat.

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, informal dan nonformal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7) Seimbang antara kepentingan global, nasional dan lokal.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional dan lokal untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan global, nasional dan lokal harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan perkembangan era globalisasi dengan tetap berpegang pada motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Prinsip dan Strategi Pengembangan KTSP

Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan dengan standar yang lebih tinggi dari standar isi, dengan tetap memperhatikan prinsip pengembangan dan penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dasar dan menengah yang disusun Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP).

Dalam Kurikulum 2006, pengembangan kurikulum mencakup juga materi yang akan diajarkan kepada peserta didik dilakukan oleh guru, kepala sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan atau forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Otoritas lembaga tersebut selain Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran, namun juga merupakan lembaga yang diberi otoritas dan legitimasi oleh pejabat di masing-masing daerah seperti pemerintah daerah, dewan pendidikan, orang tua murid, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas keputusan bersama. Lembaga-lembaga itulah yang menetapkan segala kebijakan-kebijakan berdasarkan ketentuan-ketentuan pendidikan yang berlaku. Selanjutnya dalam tataran operasional, komite sekolah dapat merumuskan, menetapkan dan menentukan Visi, Misi dan program kerja sekolah pada satuan pendidikan. Guru secara mandiri dapat merumuskan, menyusun, dan menetapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan daerah dan tujuan-tujuan lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas ada beberapa yang perlu dipahami berkaitan dengan KTSP :

- 1) Penyusunan KTSP pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- 2) Kurikulum dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

dan karakter daerah , serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.

- 3) Sekolah dan Komite Sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten /kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- 4) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk setiap program studi di perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pemerintah menyiapkan standar kompetensi dasar, selebihnya materi pokok, silabus, rencana pembelajaran dan indikator diserahkan kepada otonomi sekolah yang bersangkutan. Disinilah peran strategis guru dalam proses tranformasi ilmu pengetahuan terhadap peserta didik. KTSP memberi peluang waktu perancangan pembelajaran yang dikondisikan dengan realitas sosial kemasyarakatan, potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik kedaerahan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik, kebermkanaan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, keluasan materi pelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu yang tersedia.

4. Implementasi Kurikulum

Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner' Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah: "*put something into effect*", (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).

Berdasarkan definisi implementasi tersebut, implementasi kurikulum didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum (kurikulum potensial) dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Implementasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Miller dan Seller dalam Mulyasa (2002) bahwa: "*in some cases implementation has been identified with instruction...*". Lebih lanjut dijelaskan bahwa "implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Dikemukakannya juga bahwa implementasi kurikulum merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa implementasi kurikulum adalah operasional konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini Hasan yang dikutip Mulyasa mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum adalah hasil terjemahan guru terhadap kurikulum sebagai rencana tertulis yang sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

- a. Karakteristik kurikulum; yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di lapangan.
- b. Strategi implementasi; yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
- c. Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum (*curriculum planning*) dalam pembelajaran.

Disisi lain, Mulyasa mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah; dukungan rekan sejawat guru; dan dukungan internal yang datang dari dalam diri guru sendiri. Dari berbagai faktor tersebut guru merupakan faktor penentu di samping faktor-faktor lain. Dengan kata lain,

keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh guru, karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka hasil implementasi kurikulum (pembelajaran) tidak akan memuaskan.

Secara garis besarnya implementasi kurikulum mencakup tiga kekuatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

- a. *Pengembangan Program.* Pengembangan kurikulum mencakup pengembangan program tahunan, program semester, program modul (pokok bahasan), program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling.
- b. *Pelaksanaan Pembelajaran.* Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.
- c. *Evaluasi Hasil Belajar.* Evaluasi hasil belajar dalam implementasi kurikulum dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *bench marking* dan penilaian program.

Implementasi kurikulum di sekolah sangat beragam karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di sekolah, misalnya pemahaman guru dan kepala sekolah tentang kurikulum, ketersediaan media pembelajaran, karakteristik sekolah, dan lain-lain. Kata Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya reaksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yakni kurikulum.⁵²

Implementasi KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan mereka masing-masing. KTSP akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran, yakni bagaimana isi kurikulum (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) dapat dicerna oleh peserta didik secara tepat dan optimal.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut secara implisit tergambar bahwa kurikulum itu merupakan pedoman dan landasan

operasional bagi implementasi-implementasi proses belajar mengajar di sekolah, lembaga pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Sekaligus merupakan alat dan sarana untuk mencapai tujuan serta cita-cita pendidikan yang sudah digariskan.

Kurikulum memiliki pengertian yang cukup banyak dan kompleks. Pada intinya kurikulum membicarakan proses penyelenggaraan pendidikan sekolah, berupa acuan, rencana, norma-norma yang dipakai sebagai pegangan. Secara umum struktur kurikulum mempunyai empat komponen utama, yaitu tujuan, materi/bahan (organisasi isi), proses belajar mengajar dan evaluasi. Dalam berbagai sumber referensi disebutkan bahwa defenisi kurikulum memiliki ragam pengertian. Tetapi, ada sebuah kata kunci bahwa kurikulum yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.³⁷

5. Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Dilihat dari definisinya, Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al Qur'an dan Hadits. Fungsi Pendidikan Agama Islam di SD adalah untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, mencegah peserta didik dari pengaruh

³⁷ Nurgiyantoro, Burhan, 1988, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah; Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan*, Yogyakarta: BPFE. Hlm. 2

budaya negatif dan meningkatkan pengetahuan Agama Islam. Sedangkan tujuan Pendidikan Agama Islam SD pada intinya adalah membentuk akhlak yang mulia baik dalam kehidupan⁴ pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.³⁸

Pendidikan Agama Islam diberikan dalam rangka menanamkan nilai-nilai ke-Islaman. Upaya menanamkan nilai-nilai ke-Islaman sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang tercipta di sekolah. Lingkungan pergaulan di sekolah menjadi salah satu instrumen yang membentuk sikap dan perilaku siswa yang Islami. Lingkungan pergaulan yang baik perlu diciptakan di sekolah agar dapat mengembangkan jiwa sosial. Dengan demikian, sekolah menghadirkan berbagai kegiatan positif dalam membentuk akhlak maupun semangat peserta didik untuk berprestasi.³⁹

Sumber dan media belajar haruslah diperluas tidak hanya di lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan alam sekitar, masyarakat, instansi/lembaga, keluarga, mesjid, pasar, tokoh dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan informal juga dapat dijadikan media bagi proses belajar mereka, seperti : dalam hal berpakaian, aktivitas makan dan jajan, aktivitas ibadah, aktivitas kebersihan, aktivitas sosial. Kegiatan informal tersebut tetap harus diseleenggarakan secara sengaja meskipun tidak terencana dan tidak sistematis.⁴⁰

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional. *Kerangka dasar kurikulum 2004*. (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas), 2004, hlm 3-4

³⁹ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005, hlm 84

⁴⁰ Ibid

Namun, pendidikan agama sendiri telah mengalami pergeseran. Pergeseran pendidikan Agama Islam hanya sebagai transfer pengetahuan disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, masih kukuhnya pengaruh paham behaviorisme dalam sistem pendidikan kita. Paham ini mengacu pada pertimbangan atribut-atribut luar seperti perubahan tingkah laku peserta didik yang dapat diamati dan diukur. Konsekuensinya, proses dan evaluasi keberhasilan pendidikan terpacu pada pengukuran-pengukuran tingkah laku yang dapat diangkakan. *Kedua*, kapasitas mayoritas pendidik kita dalam mengangkat struktur dasar bahan ajar masih relatif rendah. Hal itu tidak terlepas dari keterbatasan sumber bacaan, kurangnya dukungan sarana, pengalaman pendidikan yang kurang menguntungkan. *Ketiga*, tuntutan jaman yang makin pragmatis. Setelah lokomotif ekonomi bangsa mengalami krisis moneter, pendidikan pun ikut terpuruk pada ketidakstabilan muatan misinya. Di satu pihak, ilmu pengetahuan alam yang dipandang cepat mendatangkan uang lebih disukai para peminat.⁴¹

6. Guru Agama Islam

Pengertian guru agama Islam mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan. Di Indonesia guru agama masih terbatas sebagai orang yang menyampaikan pengajaran atau informasi tentang agama. Sekarang pengertian guru agama Islam berkembang sesuai dengan tugas dan peran yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan agama Islam. Pada saat ini guru agama tidak

⁴¹ Rahmat Mulyana, *Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta), 2004, hlm 198

hanya sekedar mengajar, melainkan ia juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pengajar, pendidik dan juga sebagai pimpinan informal.⁴² Secara definitif, pengertian guru agama sebagaimana telah dirumuskan oleh para ahli di bawah ini:

Menurut Ahmad D. Marimba, guru adalah orang yang telah dewasa jasmani dan rohani yang memikul tanggung jawab untuk mendidik, membimbing atau menolong dengan sadar untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu membentuk kepribadian muslim yang utama.⁴³

Menurut Muh Athiyah al Abrasyi, guru adalah *spiritual father* atau bapak rohani bagi seorang murid yang memberikan sambutan rohani dengan ilmu yang membenarkan.⁴⁴

Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan sebaik-baiknya, maka seorang guru tidak hanya telah dewasa dan sehat jasmani dan rohani, tapi juga harus mempunyai kompetensi sebagai guru. Menurut Cogan (1997), kompetensi guru harus mempunyai: (1) kemampuan untuk memandang dan mendekati masalah-masalah pendidikan dari perspektif masyarakat global; (2) kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif dan bertanggung jawab sesuai dengan peranan dan tugas dalam masyarakat; (3) kapasitas kemampuan berpikir secara kritis dan sistematis; dan (4) keinginan untuk selalu meningkatkan kemampuan intelektual

⁴² *Petunjuk Pelaksanaan Tugas PAI*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada Sekolah Umum), hlm. 34.

⁴³ Ahmad. D.Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alma'arif 1983), hlm 56.

⁴⁴ Muh Athiyat al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 139.

sesuai dengan tuntutan jaman yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Robert W. Rihe (1974), mengemukakan 7 ciri-ciri profesionalisasi jabatan guru yaitu:⁴⁵

- a. Guru bekerja semata-mata hanya memberi pelayanan kemanusiaan bukan usaha untuk kepentingan pribadi.
- b. Guru secara hukum dituntut memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota profesi keguruan.
- c. Guru dituntut memiliki pemahaman serta ketrampilan yang tinggi.
- d. Guru dalam organisasi profesional memiliki publikasi yang dapat melayani para guru sehingga tidak ketinggalan bahkan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.
- e. Guru selalu diusahakan mengikuti kursus-kursus, *workshop*, seminar, konvensi dan terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan in service.
- f. Guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karier hidup (*a live carier*)
- g. Guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun secara lokal.

Pandangan yang ideal mengenai profesionalisme guru, direfleksikan dalam citra guru masa depan, sebagaimana dikemukakan oleh Sudarminta yaitu guru yang: (1) sadar dan tanggap akan perubahan zaman; (2) berkualifikasi profesional; (3) rasional, demokratis dan

⁴⁵ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung, Alfabeta, 2000), hal 209

berwawasan nasional; (4) bermoral tinggi, beriman.

Johnson sebagaimana dikutip Sanusi dkk (1991) mengetengahkan tiga aspek performansi guru, yaitu:

- a. Kemampuan profesional yang mencakup: (1) penguasaan pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dan bahan yang diajarkan itu; (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan; (3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.
- b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru.
- c. Kemampuan personal guru, mencakup: (1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya; (2) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogjanya dianut oleh seorang guru; (3) Penampilan kepribadian, nilai, sikap hidup sebagai upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

E. Kajian Pustaka

Tesis ini berjudul "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMK Negeri 2 Pengasih". Menurut Pengamatan penulis, kajian tentang KTSP belum

pernah dikaji, hal ini disebabkan penelitian mengenai kurikulum KTSP pada saat penelitian ini dilaksanakan masih berjalan empat tahun pelajaran yaitu 2006-2007 sampai dengan tahun pelajaran 2010-2011.

1. Athok Fu'adi, 2005, dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi Kurikulum. 2004 Pembelajaran Agama Islam di SMA Negeri 7 Yogyakarta".⁴⁶ Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan Implementasi kurikulum 2004 pembelajaran agama. Islam yang meliputi: Pertama persiapan pembelajaran Agama Islam, kedua proses pembelajaran agama Islam, ketiga penilaian pembelajaran agama Islam, keempat faktor yang menghambat pembelajaran agama Islam.
2. Sugeng Sugiyono, 1999, dengan tesisnya yang berjudul "Kurikulum Pendidikan dalam al-Qur'an",⁴⁷ secara garis besar menerangkan bahwa sumber kurikulum pendidikan Islam adalah al-Qur'an, tetapi dalam pembahasannya masih bersifat global dan diperlukan kajian yang lebih rinci dan sistematis
3. Anis Farikhatin, 2006, di dalam tesisnya yang berjudul: "Implementasi Pendekatan Andragogi dalam pembelajaran Agama Islam di SMA 1 Piri Yogyakarta".⁴⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penerapan pendekatan andragogi serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Piri 1 Yogyakarta.

⁴⁶ Athok Fu'adi, "Implementasi Kurikulum 2004 Pembelajaran Agama Islam di SMA Negeri 7 Yogyakarta", Tesis (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2005).

⁴⁷ Sugeng Sugiyono, "Kurikulum Pendidikan dalam al-Qur'an", Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999).

⁴⁸ Anis Farikhatin, "Implementasi Pendekatan Andragogi dalam pembelajaran Agama Islam : SMA 1 Piri Yogyakarta", Tesis (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006).

Penelitian ini didasarkan atas permasalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung, pendekatan pembelajaran konvensional yang selama ini dilaksanakan secara mekanistik, *cognitive oriented*, *indoctrinate*, serta berpusat pada guru berdampak terhadap rendahnya kualitas pembelajaran. Hal ini ditandai dengan rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam, mengakibatkan siswa menjadi pasif, tidak percaya diri dalam belajar, serta kering dengan spiritualitas.

4. Mardhiyatun, 2005, "Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Berbasis Kompetensi di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta".⁴⁹ Dalam penelitian itu menghasilkan cara implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran melalui tiga fase, yaitu pertama, perencanaan yang meliputi perencanaan program satu tahun (prota), merencanakan program satu semester (promes), merencanakan program bulanan, merencanakan program mingguan dan merencanakan program harian. Kedua, pelaksanaan program menggunakan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang bervariasi, model pembelajaran berpusat pada siswa dan kontekstual, sarana dan prasarana sudah ideal, tetapi dalam penggunaan sarana dan prasarana terlihat kurang efektif karena kurang mumpuninya guru dalam mendayagunakan sarana tersebut. Ketiga, evaluasi sudah mencerminkan penilaian KBK dengan mengakomodasi ketiga ranah penilaian yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik.

⁴⁹ Mardhiyatun, "Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Berbasis Kompetensi di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta", Tests (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Sedangkan dalam, teknik penilaian dilakukan dengan model penilaian berbasis kelas, penilaian sikap, dan penilaian portofolio.

Penelitian ini menitikberatkan kepada Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Implementasi kurikulum ini, menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti, karena berkaitan dengan Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permen Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Permen Nomor 24 tentang Pelaksanaan Kedua Permendiknas tersebut. Serta untuk mengungkap faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat implementasi KTSP PAI di SMKN 2 Pengasih Kulon Progo.